

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN TENTANG UAN (UJIAN AKHIR NASIONAL)**

**Akmal Alamsyah**

Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta  
[akmalalamsyah15@gmail.com](mailto:akmalalamsyah15@gmail.com)

**Abstrak**

Kebijakan pendidikan mengenai Ujian Akhir Nasional (UAN) telah menjadi salah satu instrumen evaluasi pendidikan yang strategis di Indonesia. UAN digunakan sebagai tolak ukur pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional dan sebagai dasar pertimbangan dalam pemetaan mutu pendidikan. Namun, pelaksanaannya menimbulkan berbagai problematika, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Fokus yang berlebihan pada hasil ujian menyebabkan terpinggirkannya nilai-nilai spiritual, etika, dan aspek pembentukan karakter yang menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan UAN dari perspektif kebijakan publik dan problematikanya dalam konteks pendidikan Islam. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi pustaka, makalah ini menyimpulkan bahwa UAN, meskipun berniat standarisasi mutu pendidikan, justru menimbulkan ketimpangan, tekanan psikologis bagi siswa, serta mereduksi makna pendidikan yang holistik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan manusiawi yang selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam.

**Kata kunci:** Ujian Akhir Nasional, kebijakan pendidikan, problematika, pendidikan Islam, evaluasi pendidikan.

**Abstract**

*The educational policy on the National Final Examination (UAN) has served as a strategic evaluation instrument in Indonesia. UAN is used as a benchmark to measure graduates' competency standards on a national level and as a basis for mapping the quality of education. However, its implementation has raised various issues, especially in the context of Islamic education. The excessive focus on exam results often sidelines spiritual values, ethics, and character formation – key elements of Islamic education. This paper aims to analyze the UAN policy from a public policy perspective and explore its problems in the realm of Islamic education. Using a qualitative-descriptive approach and literature review, this study concludes that although UAN intends to standardize educational quality, it has resulted in inequality, psychological pressure on students, and a reduction in the holistic essence of education. Therefore, a more inclusive and human-centered policy approach aligned with Islamic educational values is urgently needed.*

**Keywords:** National Final Examination, education policy, problems, Islamic education, educational evaluation.

**Article History**

Received: July 2025  
Reviewed: July 2025  
Published: July 2025  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI: Prefix DOI:  
10.8734/SINDORO.v1i2.365  
**Copyright: Author**  
**Publish by: SINDORO**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa<sup>1</sup>. Dalam konteks Indonesia, pendidikan memiliki fungsi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu kebijakan penting dalam sistem pendidikan nasional adalah penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional (UAN), yang selama bertahun-tahun dijadikan sebagai instrumen utama dalam mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara nasional. UAN diberlakukan sebagai bentuk standarisasi mutu pendidikan sekaligus sebagai alat pengendali sistem pendidikan dari pusat. Namun, kebijakan ini menuai banyak kritik karena dianggap terlalu menekankan aspek kognitif semata dan mengabaikan dimensi afektif serta psikomotorik, terutama dalam konteks pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara ilmu dan akhlak.

UAN sebagai kebijakan pendidikan sebenarnya dilandasi oleh semangat peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya standar penilaian yang seragam, dapat tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan UAN sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang besar bagi peserta didik, guru, dan bahkan institusi pendidikan itu sendiri. Banyak sekolah yang terjebak dalam praktik "*teaching to the test*", yakni mengajar hanya untuk menghadapi ujian, bukan untuk membentuk pemahaman yang mendalam dan nilai-nilai karakter. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pendidikan dari proses menjadi hasil, dari pembinaan karakter menjadi pencapaian angka.

Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan UAN memunculkan dilema tersendiri. Pendidikan Islam tidak hanya menargetkan keberhasilan akademik, melainkan juga keberhasilan spiritual dan moral. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada penilaian kuantitatif seperti UAN dianggap kurang selaras dengan prinsip dasar pendidikan Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, kerja keras, dan tanggung jawab yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pendidikan, justru sering kali dikorbankan demi pencapaian nilai ujian yang tinggi. Tak jarang pula ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai etika dalam pelaksanaan UAN, seperti kecurangan massal yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

Kritik terhadap UAN semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai problematika di lapangan, termasuk kesenjangan akses pendidikan, ketimpangan kualitas antar daerah, serta lemahnya integrasi antara evaluasi nasional dan kebutuhan lokal.<sup>3</sup> Berbagai kalangan, baik dari praktisi pendidikan maupun akademisi, mulai mempertanyakan efektivitas UAN sebagai alat ukur tunggal dalam menentukan kelulusan siswa. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana penghapusan UAN pun mulai mengemuka, seiring dengan reformasi sistem evaluasi pendidikan nasional yang lebih inklusif dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, makalah ini berupaya untuk mengkaji secara kritis kebijakan pendidikan tentang UAN dari perspektif analisis kebijakan publik dan relevansinya dalam pendidikan Islam. Kajian ini penting dilakukan guna mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul di lapangan, serta memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, makalah ini juga

<sup>1</sup> Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). Pentingnya keterampilan belajar di abad 21 sebagai tuntutan dalam pengembangan sumber daya manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 29- 40.

<sup>2</sup> Hendrik Dewantara, S. E. (2024). *Membangun masa depan pendidikan: Inovasi dan tantangan dalam sertifikasi guru di Indonesia*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

<sup>3</sup> Santoso, A. (Ed.). (2013). *Ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan: jalan panjang menuju pembangunan berkelanjutan pasca-2015*. INSISTPress.

bertujuan untuk menawarkan alternatif kebijakan evaluasi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses dan pembentukan karakter peserta didik.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan pendidikan terkait Ujian Akhir Nasional (UAN). Analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis isi kebijakan, tujuan, implementasi, serta dampaknya terhadap pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika kebijakan UAN secara komprehensif, mengungkap problematika yang muncul, serta merumuskan rekomendasi yang relevan dengan prinsip pendidikan Islam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Sejarah dan Latar Belakang Kebijakan Ujian Akhir Nasional

Ujian Akhir Nasional (UAN), yang kemudian dikenal sebagai Ujian Nasional (UN), merupakan kebijakan evaluasi pendidikan yang telah mengalami berbagai transformasi sejak era Orde Baru hingga sekarang. Awalnya, sistem evaluasi pendidikan berskala nasional di Indonesia dikenal dengan nama Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) yang mulai diterapkan pada tahun 1980-an. EBTANAS bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara nasional dan menjadi alat kontrol mutu pendidikan dari pemerintah pusat.<sup>4</sup> Namun, sistem ini sempat dikritik karena terlalu menitikberatkan pada hasil ujian tertulis tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran yang dialami siswa di kelas.

Perubahan besar terjadi pada awal tahun 2000-an ketika pemerintah mengganti EBTANAS dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai bagian dari reformasi pendidikan. UAN diharapkan dapat menjadi alat ukur yang lebih objektif dan terstandar dalam menilai kompetensi peserta didik pada tingkat akhir pendidikan dasar dan menengah. Dalam kebijakan ini, nilai UAN menjadi penentu kelulusan siswa, yang kemudian memunculkan sejumlah kontroversi di kalangan praktisi pendidikan.<sup>5</sup> Kelulusan siswa yang semata-mata ditentukan oleh skor ujian akhir menimbulkan ketegangan psikologis, serta memicu ketimpangan antara daerah dengan fasilitas pendidikan yang baik dan daerah yang kurang berkembang.

Latar belakang diterapkannya UAN berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing pendidikan nasional. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang sangat luas dan tingkat keragaman sosial yang tinggi memerlukan sistem evaluasi terstandar untuk menjamin kualitas pendidikan yang merata. UAN dipandang sebagai solusi untuk memetakan capaian pendidikan di berbagai wilayah secara objektif, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan lanjutan.<sup>6</sup> Namun, sistem ini juga mengandung risiko homogenisasi pendidikan yang tidak selalu relevan dengan konteks lokal masing-masing sekolah atau daerah, terutama dalam wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Dalam perjalanan waktu, kritik terhadap UAN semakin meningkat. Banyak pihak menilai bahwa sistem ini mengabaikan aspek holistik dari pendidikan, seperti pengembangan karakter, nilai-nilai moral, dan kompetensi non-akademik.<sup>7</sup> Selain itu, orientasi yang terlalu kuat pada hasil ujian menyebabkan terjadinya penyempitan kurikulum dan munculnya praktik mengajar

<sup>4</sup> Symbolon, K. (2020). Ujian Nasional Sebagai Penentu Kelulusan Merugikan Peserta Didik.

<sup>5</sup> Donovan, R. (2020). Evaluasi Sistem Pendidikan Indonesia: Kebijakan Ujian. *JURNAL PROFESI PENDIDIK Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah*, 7(2), 79-91.

<sup>6</sup> Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>7</sup> Yudha, H. S., Supriatna, A., Riyadi, A., Surya, C. M., & Kuswandi, S. (2025). Pengembangan Model Manajemen Pendidikan Holistik Berbasis Nilai Keislaman di Madrasah Ibtidaiyah. *Attractive: Innovative Education Journal*, 7(1), 58-75.

yang hanya berfokus pada materi ujian. Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi ini semakin problematik karena tidak mencerminkan prinsip keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pembinaan akhlak. Oleh karena itu, pemahaman sejarah dan latar belakang kebijakan UAN menjadi penting sebagai dasar evaluasi dan perumusan sistem evaluasi pendidikan yang lebih relevan dan manusiawi ke depan.

### **3.2 Tujuan dan Fungsi UAN dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Ujian Akhir Nasional (UAN) merupakan kebijakan evaluasi pendidikan yang telah lama diterapkan di Indonesia dengan tujuan utama untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara nasional. UAN dirancang sebagai alat standarisasi hasil belajar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.<sup>8</sup> Tujuan strategis dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa seluruh siswa di Indonesia, baik di kota besar maupun di daerah terpencil, memperoleh pendidikan yang setara dan mencapai kompetensi minimal yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, UAN berfungsi sebagai tolok ukur nasional dalam menilai sejauh mana kurikulum nasional telah dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah.

Selain sebagai alat evaluasi pencapaian siswa, UAN juga berfungsi sebagai instrumen untuk memetakan mutu pendidikan di berbagai daerah. Hasil UAN digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menilai kualitas sekolah, kinerja guru, dan efektivitas kurikulum yang diterapkan. Data yang dihasilkan dari UAN menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan selanjutnya, seperti distribusi anggaran, pembinaan sekolah, serta penyusunan program peningkatan kualitas pengajaran.<sup>9</sup> Dengan fungsi ini, UAN diharapkan mampu mengungkap ketimpangan pendidikan yang terjadi antar daerah serta memberikan peta kebutuhan pendidikan yang lebih akurat dan berbasis data.

Fungsi lainnya dari UAN adalah sebagai alat seleksi dan penentu kelulusan peserta didik. Selama bertahun-tahun, kelulusan siswa sangat bergantung pada hasil UAN, yang secara tidak langsung menempatkan UAN sebagai instrumen yang menentukan masa depan peserta didik. Hal ini menyebabkan UAN menjadi ujian yang sangat ditakuti dan menimbulkan tekanan besar baik bagi siswa maupun guru. Meskipun kebijakan ini kemudian mengalami perubahan—di mana kelulusan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh UAN—dampaknya terhadap persepsi masyarakat dan praktik pendidikan masih terasa hingga kini. Orientasi pendidikan pun bergeser ke arah pencapaian nilai ujian, bukan pada proses pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna.

Di sisi lain, UAN juga berperan sebagai alat kendali mutu pendidikan oleh pemerintah pusat. Dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralistik seperti di Indonesia, diperlukan alat kendali dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh daerah tetap berada dalam kerangka standar nasional. UAN menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseragaman tersebut. Namun demikian, pendekatan sentralistik ini juga mengundang kritik, karena kurang mempertimbangkan keragaman karakteristik daerah, budaya, dan kemampuan peserta didik di berbagai wilayah Indonesia. Ketika satu standar dipaksakan untuk seluruh siswa tanpa mempertimbangkan konteks lokal, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian.

Secara keseluruhan, UAN memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Ia berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi hasil belajar, tetapi juga sebagai instrumen pemetaan mutu dan kendali sistem pendidikan.<sup>10</sup> Namun demikian, implementasi UAN perlu dikaji secara terus-menerus agar tidak mengorbankan dimensi lain dalam pendidikan, seperti pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai spiritual dan moral,

---

<sup>8</sup> Sihono, S., Isbah, M. F., & Pangestuti, P. (2025). Komparasi Standar Penilaian Pendidikan di Negara-negara Maju: (Studi Kasus Finlandia, Jepang, dan Singapura). *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 388-401.

<sup>9</sup> Suradji, M. (2018). Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesiswaan, kepegawaian dan keuangan di sma muhammadiyah 1 Gresik. *TALIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2), 347-371.

<sup>10</sup> Supadi, M. P. (2021). *Manajemen Mutu Pendidikan*. UNJ PRESS.

serta pengembangan potensi individu secara utuh. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi pendidikan idealnya tidak hanya terfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik yang mencerminkan keseluruhan pribadi manusia. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan metode evaluasi yang lebih holistik dan inklusif.

### **3.3 Problematika Implementasi UAN di Lapangan**

Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang bersifat seragam secara nasional telah menimbulkan berbagai persoalan dalam praktiknya di lapangan. Salah satu masalah utama adalah tekanan psikologis yang dialami oleh siswa. Banyak peserta didik yang merasa cemas, stres, bahkan depresi menghadapi ujian ini karena hasilnya menentukan kelulusan dan masa depan akademik mereka. Dalam beberapa kasus, tekanan ini bukan hanya dialami oleh siswa, tetapi juga guru dan orang tua, yang kemudian mendorong siswa untuk belajar secara intensif tanpa memperhatikan keseimbangan fisik dan mental. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran kehilangan maknanya sebagai proses membangun pemahaman dan karakter, dan berubah menjadi upaya mengejar nilai semata.<sup>11</sup>

Selain tekanan psikologis, problematika lain yang muncul adalah ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dengan fasilitas memadai, guru berkualitas, dan dukungan teknologi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mencapai nilai UAN yang tinggi dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil. Hal ini menciptakan kesenjangan yang semakin melebar antara sekolah maju dan tertinggal. UAN, yang dimaksudkan untuk menjadi alat ukur keadilan dan mutu pendidikan, justru memperlihatkan ketidakadilan struktural yang belum mampu diatasi oleh sistem pendidikan nasional. Akibatnya, banyak siswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) merasa terdiskriminasi karena mereka diharuskan memenuhi standar yang sama tanpa mendapat perlakuan dan fasilitas yang setara.

Di sisi lain, orientasi kebijakan UAN yang menitikberatkan pada capaian kognitif telah mendorong sekolah untuk fokus pada “*teaching to the test*” atau mengajar hanya demi mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional. Kurikulum yang seharusnya bersifat menyeluruh dan membentuk karakter siswa, justru dipersempit hanya pada materi-materi yang diujikan.<sup>12</sup> Praktik ini mereduksi makna pendidikan menjadi sekadar perolehan angka, bukan proses pembentukan manusia yang utuh. Bahkan, tidak jarang ditemui praktik-praktik manipulatif seperti kecurangan ujian, kerja sama antar siswa, hingga kebocoran soal yang menunjukkan lemahnya integritas dalam pelaksanaan UAN. Fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan amanah.

Akhirnya, pelaksanaan UAN yang bertujuan baik justru menyisakan banyak persoalan serius yang menuntut evaluasi mendalam. Jika kebijakan ini tidak ditinjau ulang, maka pendidikan hanya akan menjadi alat seleksi dan klasifikasi yang bersifat semu, tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan pembentukan akhlak mulia. Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan negara dan nilai-nilai inti pendidikan Islam. Oleh karena itu, problematika implementasi UAN tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pembenahan yang menyeluruh dalam sistem evaluasi pendidikan nasional.

### **3.4 Tinjauan Kritis terhadap UAN dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai instrumen penilaian pendidikan telah lama menjadi fokus dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Namun, jika ditinjau dari perspektif pendidikan Islam, kebijakan ini menyisakan berbagai persoalan yang perlu dikritisi secara mendalam. Pendidikan Islam memandang proses belajar sebagai sarana pembentukan insan

<sup>11</sup> Iriany, I. S. (2014). Pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 54-85.

<sup>12</sup> Hakim, L. (2020). *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Gestalt Media.

kamil, yaitu manusia yang utuh secara intelektual, spiritual, dan moral. Tujuan pendidikan bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan akhlak mulia. Dalam hal ini, UAN yang hanya menekankan aspek kognitif, terutama melalui soal-soal pilihan ganda, cenderung mengabaikan nilai-nilai esensial pendidikan Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.<sup>13</sup>

UAN kerap menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi bagi siswa, guru, dan orang tua. Dalam banyak kasus, tekanan ini memunculkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti mencontek, kebocoran soal, atau bahkan kecurangan sistematis yang melibatkan pihak sekolah demi mempertahankan reputasi. Hal ini menciptakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip amanah (kepercayaan) dan *shidq* (kejujuran) yang dijunjung tinggi dalam Islam. Ketika ujian menjadi momok menakutkan dan tujuan pendidikan direduksi menjadi sekadar nilai angka, maka yang muncul adalah kompetisi semu yang mengabaikan proses pendidikan yang bermakna.

Pendidikan Islam menekankan pentingnya proses internalisasi nilai dan pembentukan karakter (*tazkiyatun nafs*), bukan semata hasil akhir. Dalam konteks ini, UAN justru menjadi penghambat integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan. Misalnya, pelajaran agama dan pendidikan karakter sering kali kurang diperhatikan karena dianggap tidak diujikan dalam UAN. Akibatnya, guru dan siswa lebih fokus pada mata pelajaran yang diuji, sehingga aspek spiritual dan emosional siswa menjadi terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa UAN, secara sistemik, tidak mendukung visi pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Dari sisi epistemologis, pendidikan Islam tidak hanya mengandalkan hafalan atau penguasaan materi secara instan, melainkan mendorong pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ilmu. Sistem penilaian seperti UAN yang lebih menitikberatkan pada hasil akhir (*output-based evaluation*) dianggap tidak representatif dalam menilai pencapaian tujuan pendidikan Islam secara holistik. Islam menghargai proses belajar yang konsisten dan penuh kesungguhan (*ijtihad*), di mana keberhasilan tidak hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari usaha dan niat yang ikhlas. Oleh karena itu, sistem penilaian yang adil menurut Islam adalah sistem yang memberikan ruang bagi berbagai aspek perkembangan peserta didik, termasuk sikap, keterampilan, dan akhlak.

Dengan demikian, dari perspektif pendidikan Islam, kebijakan UAN memerlukan evaluasi mendalam agar tidak melahirkan sistem yang kontraproduktif terhadap tujuan pendidikan nasional maupun Islam. Reformasi kebijakan pendidikan perlu mengarah pada model evaluasi yang lebih menyeluruh dan seimbang, seperti portofolio, asesmen formatif, dan observasi perilaku. Evaluasi semacam ini tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik peserta didik. Pendidikan Islam mendambakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan bermoral. Maka, kebijakan penilaian pun harus berpihak pada pembentukan insan berkarakter, bukan sekadar pencetak nilai ujian.

### **3.5 Reformasi Evaluasi Pendidikan dan Alternatif Pengganti UAN**

Reformasi dalam sistem evaluasi pendidikan Indonesia merupakan respons terhadap berbagai kritik dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN). UAN dinilai terlalu berorientasi pada aspek kognitif semata dan sering kali mengabaikan aspek afektif serta psikomotorik yang menjadi bagian penting dalam proses pendidikan holistik.<sup>14</sup> Selain itu, standar penilaian yang seragam di seluruh Indonesia justru memperparah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah mulai merancang sistem evaluasi yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual dengan realitas satuan pendidikan masing-masing. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penghapusan UAN dan

<sup>13</sup> Sukiyat, H. (2020). *Strategi implementasi pendidikan karakter*. Jakad Media Publishing.

<sup>14</sup> Suwardani, N. P. (2020). "QUO VADIS" PENDIDIKAN KARAKTER: dalam *Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat*. Unhi Press.

penggantian dengan Asesmen Nasional (AN) yang dimulai pada tahun 2021.

Asesmen Nasional dirancang sebagai evaluasi yang tidak lagi menilai hasil belajar individu siswa, tetapi lebih kepada menilai mutu satuan pendidikan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.<sup>15</sup> AKM bertujuan mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik, yang dianggap sebagai kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Survei Karakter mengukur nilai-nilai seperti integritas, gotong royong, dan kemandirian, sedangkan Survei Lingkungan Belajar mengkaji aspek-aspek non-akademik seperti iklim sekolah, keterlibatan guru, serta dukungan terhadap proses pembelajaran. Reformasi ini menggeser paradigma evaluasi dari sekadar pengujian hasil ke arah pemetaan kondisi pendidikan secara menyeluruh.

Dari perspektif pendidikan Islam, pendekatan yang lebih holistik seperti yang ditawarkan oleh AN dapat dianggap lebih selaras dengan prinsip dasar Islam dalam mendidik manusia secara kaffah (menyeluruh). Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak insan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki kesadaran spiritual. Oleh karena itu, integrasi antara kemampuan akademik dan pembentukan karakter sangat penting. AN sebagai alat ukur institusional membuka ruang bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran secara menyeluruh, termasuk bagaimana menanamkan nilai-nilai Islami dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Meski demikian, penguatan dari sisi implementasi dan pemahaman konsep AN di kalangan pendidik masih perlu ditingkatkan.

Meskipun Asesmen Nasional menjadi langkah awal yang positif dalam reformasi evaluasi pendidikan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesadaran dan kesiapan semua pihak yang terlibat. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan harus diberi pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan manfaat asesmen ini.<sup>16</sup> Selain itu, perlu adanya pelatihan dan penguatan kapasitas dalam menyusun strategi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga proses dan karakter. Pemerintah juga dituntut untuk memberikan dukungan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal secara fasilitas maupun SDM, agar pelaksanaan AN tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Dengan demikian, penghapusan UAN dan peralihan menuju sistem asesmen yang lebih komprehensif merupakan langkah maju dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Reformasi ini menjadi peluang untuk memperbaiki arah kebijakan pendidikan agar tidak lagi sekadar mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk manusia yang utuh secara intelektual, moral, dan spiritual. Dalam konteks pendidikan Islam, reformasi ini juga menjadi momentum untuk mengembalikan ruh pendidikan sebagai sarana pembentukan akhlak dan peradaban. Oleh karena itu, evaluasi pendidikan ke depan harus terus dikembangkan agar lebih manusiawi, adil, serta berakar pada nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari pendidikan itu sendiri.

### **3.6 Dampak Sosial dan Psikologis Kebijakan UAN terhadap Peserta Didik**

Kebijakan Ujian Akhir Nasional (UAN) telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan psikologis peserta didik. Sebagai ujian yang menentukan kelulusan dan menjadi tolok ukur mutu pendidikan nasional, UAN menempatkan siswa dalam tekanan tinggi. Banyak siswa merasa masa depannya ditentukan hanya oleh hasil satu kali ujian, yang mengabaikan proses belajar panjang selama bertahun-tahun. Ketakutan gagal dan rasa cemas yang berlebihan menjadikan UAN sebagai sumber stres utama, terutama menjelang masa ujian. Tidak sedikit siswa yang mengalami gangguan kecemasan, insomnia, hingga psikosomatik akibat tekanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan evaluasi berbasis ujian tunggal seperti UAN memiliki konsekuensi psikologis serius yang sering kali luput dari perhatian para pembuat kebijakan.

---

<sup>15</sup> Wildan, A. (2022). Implementasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). *HASBUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 13-22.

<sup>16</sup> Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.

Dampak psikologis ini tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh orang tua dan guru. Orang tua sering menempatkan ekspektasi tinggi kepada anaknya, bahkan ada yang menggunakan ancaman atau hukuman bila hasil UAN tidak memuaskan. Di sisi lain, guru pun merasakan tekanan karena dituntut untuk mencapai target kelulusan sekolah yang tinggi. Akibatnya, proses pembelajaran di kelas cenderung berorientasi pada latihan soal dan strategi menjawab ujian, bukan pada pemahaman mendalam atau pengembangan karakter.<sup>17</sup> Lingkungan pendidikan menjadi penuh ketegangan, kehilangan esensi sebagai ruang yang nyaman untuk tumbuh dan belajar. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan budaya belajar yang transaksional dan mekanistik, jauh dari semangat pendidikan yang holistik dan manusiawi.

Secara sosial, kebijakan UAN juga memperkuat kesenjangan pendidikan antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan. Akses terhadap bimbingan belajar, fasilitas pendidikan, dan sumber daya belajar yang memadai lebih banyak dinikmati siswa di kota. Sementara itu, siswa di daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur, guru, bahkan jaringan listrik dan internet, yang membuat mereka kesulitan mengikuti pola pembelajaran intensif menjelang UAN. Akibatnya, siswa dari daerah tertinggal memiliki peluang lebih kecil untuk memperoleh nilai tinggi dalam UAN, dan hal ini memperbesar ketimpangan sosial dan pendidikan antarwilayah.

Lebih lanjut, sistem UAN juga turut mengubah relasi sosial antar siswa. Persaingan yang sangat ketat untuk meraih nilai tertinggi menciptakan atmosfer yang kompetitif, bukan kolaboratif. Siswa yang memiliki prestasi rendah sering mengalami penurunan harga diri, merasa tidak mampu, dan terpinggirkan dalam lingkungan sosial sekolah. Bahkan, dalam beberapa kasus, tekanan akademik yang tinggi telah mendorong beberapa siswa untuk melakukan tindakan ekstrem, termasuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Fenomena ini mencerminkan pentingnya memperhatikan dampak kebijakan pendidikan terhadap kesehatan mental peserta didik.

Mengingat besarnya dampak sosial dan psikologis kebijakan UAN, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem evaluasi pendidikan nasional. Evaluasi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pertumbuhan emosional, spiritual, dan sosial peserta didik. Sistem penilaian yang lebih fleksibel, berkelanjutan, dan berbasis proses perlu dipertimbangkan. Pendidikan Islam, yang menekankan keseimbangan antara ilmu dan akhlak, dapat menjadi rujukan penting dalam merancang sistem evaluasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi menjadi sumber tekanan, tetapi menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang siswa secara menyeluruh.

### **3.7 Urgensi Evaluasi Pendidikan yang Berbasis Nilai-Nilai Islam**

Evaluasi pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah, kualitas, dan keberhasilan proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya dimaknai sebagai pengukuran hasil belajar kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik yang terkait dengan pembentukan akhlak, spiritualitas, dan kepribadian peserta didik. Evaluasi yang berbasis nilai-nilai Islam bertujuan untuk menciptakan manusia seutuhnya (*insan kāmīl*) yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan kesadaran spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, urgensi penerapan sistem evaluasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam menjadi sangat penting dalam merespons keterbatasan pendekatan evaluasi konvensional yang bersifat kuantitatif dan berorientasi pada hasil semata.

Salah satu problematika mendasar dalam pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) adalah tereduksinya makna pendidikan menjadi sekadar pencapaian nilai. UAN cenderung mendorong siswa dan guru untuk berorientasi pada hasil, bukan pada proses pembelajaran yang bermakna.

---

<sup>17</sup> Sani, R. A. (2021). *Pembelajaran berorientasi akm: asesmen kompetensi minimum*. Bumi Aksara.

Akibatnya, banyak sekolah yang fokus pada pelatihan soal dan mengabaikan penanaman nilai-nilai karakter.<sup>18</sup> Dalam pandangan Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan otak, tetapi juga menyucikan jiwa (*tazkiyatun nafs*). Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan rasa ikhlas harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem evaluasi. Jika evaluasi pendidikan tidak memasukkan aspek-aspek tersebut, maka proses pendidikan akan kehilangan ruh-nya sebagai sarana pembentukan insan yang beriman dan berakhlak mulia.

Selain itu, sistem evaluasi yang berbasis Islam juga harus mempertimbangkan keadilan dan keterjangkauan. Evaluasi tidak boleh bersifat diskriminatif atau hanya menguntungkan peserta didik dari latar belakang tertentu. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa setiap manusia diuji sesuai kemampuannya (QS. Al-Baqarah: 286). Maka, evaluasi harus disesuaikan dengan kemampuan individual peserta didik dan tidak seragam secara kaku. Evaluasi yang Islami juga mendorong adanya pendekatan personal dan holistik, yakni dengan menilai peserta didik berdasarkan perkembangan spiritual, etika, sosial, dan intelektual mereka secara menyeluruh. Ini bertentangan dengan sistem seperti UAN yang sering mengabaikan aspek-aspek tersebut demi angka dan statistik kelulusan.

Urgensi lain dari evaluasi yang berbasis Islam adalah untuk membangun budaya akademik yang berintegritas. Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip utama dalam proses belajar mengajar. Namun, praktik kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan UAN menjadi ironi besar dalam sistem pendidikan nasional. Kecurangan tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi bahkan dibantu oleh oknum guru atau sekolah demi mempertahankan reputasi. Sistem evaluasi yang Islami harus mampu membangun kesadaran akan pentingnya amanah dalam menjalani proses pendidikan. Guru dan siswa harus diarahkan untuk menjadikan ujian sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri, bukan sekadar ajang kompetisi atau formalitas administratif.

Dengan demikian, urgensi evaluasi pendidikan berbasis nilai-nilai Islam sangat relevan dalam menghadapi tantangan dan krisis makna dalam dunia pendidikan saat ini. Evaluasi bukan sekadar alat ukur, tetapi bagian integral dari proses pembentukan karakter. Maka diperlukan paradigma baru yang memadukan antara keilmuan dan spiritualitas dalam evaluasi. Reformasi sistem penilaian perlu diarahkan untuk mengakomodasi keutuhan potensi peserta didik serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dengan cara ini, pendidikan Islam akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

#### **4. KESIMPULAN**

Kebijakan Ujian Akhir Nasional (UAN) merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melakukan standarisasi mutu pendidikan secara nasional. Tujuan awal dari kebijakan ini adalah untuk mengevaluasi capaian belajar peserta didik secara objektif dan menyeluruh. Namun, dalam pelaksanaannya, UAN sering kali menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tekanan psikologis terhadap siswa, praktik belajar yang hanya berorientasi pada hasil, hingga munculnya ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Evaluasi yang terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif cenderung mengabaikan nilai-nilai penting lainnya dalam pendidikan seperti afektif, spiritual, dan moral.

Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan UAN dipandang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar pendidikan yang menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pembentukan akhlak. Pendidikan Islam tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga pembentukan insan yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi yang hanya berbasis angka dan hasil ujian tidak mampu menggambarkan kualitas pendidikan secara utuh sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>18</sup> Wakhidah, K., & Adiarti, W. (2014). Pengaruh penanaman nilai-nilai konservasi terhadap karakter peduli pada lingkungan anak usia dini. *BELIA: Early Childhood Education Papers*, 3(2).

Diperlukan reformasi sistem evaluasi pendidikan yang lebih holistik dan inklusif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Evaluasi seharusnya menjadi proses pembelajaran itu sendiri, bukan hanya alat ukur. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem penilaian, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan spiritual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Donovan, R. (2020). "Evaluasi Sistem Pendidikan Indonesia: Kebijakan Ujian". *JURNAL PROFESI PENDIDIK Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah*, 7(2), 79-91
- Hakim, L. (2020). *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Gestalt Media.
- Hendrik Dewantara, S. E. (2024). *Membangun masa depan pendidikan: Inovasi dan tantangan dalam sertifikasi guru di Indonesia*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Iriany, I. S. (2014). "Pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa". *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 54-85.
- Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). "Pentingnya keterampilan belajar di abad 21 sebagai tuntutan dalam pengembangan sumber daya manusia". *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 29-40.
- Mulyasa, H. E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Sani, R. A. (2021). *Pembelajaran berorientasi akm: asesmen kompetensi minimum*. Bumi Aksara.
- Santoso, A. (Ed.). (2013). *Ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan: jalan panjang menuju pembangunan berkelanjutan pasca-2015*. INSISTPress
- Sihono, S., Isbah, M. F., & Pangestuti, P. (2025). "Komparasi Standar Penilaian Pendidikan di Negara-negara Maju: (Studi Kasus Finlandia, Jepang, dan Singapura)". *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 388-401.
- Simbolon, K. (2020). *Ujian Nasional Sebagai Penentu Kelulusan Merugikan Peserta Didik*.
- Sukiyat, H. (2020). *Strategi implementasi pendidikan karakter*. Jakad Media Publishing.
- Supadi, M. P. (2021). *Manajemen Mutu Pendidikan*. UNJ PRESS.
- Suradji, M. (2018). "Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesiswaan, kepegawaian dan keuangan di sma muhammadiyah 1 Gresik". *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2), 347-371.
- Suwardani, N. P. (2020). "*QUO VADIS*" *PENDIDIKAN KARAKTER: dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat*. Unhi Press.
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwinarti, A. (2024). *Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wakhidah, K., & Adiarti, W. (2014). "Pengaruh penanaman nilai-nilai konservasi terhadap karakter peduli pada lingkungan anak usia dini". *BELIA: Early Childhood Education Papers*, 3(2).
- Wildan, A. (2022). "Implementasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)". *HASBUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 13-22.
- Yudha, H. S., Supriatna, A., Riyadi, A., Surya, C. M., & Kuswandi, S. (2025). "Pengembangan Model Manajemen Pendidikan Holistik Berbasis Nilai Keislaman di Madrasah Ibtidaiyah". *Attractive: Innovative Education Journal*, 7(1), 58-75.